DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 /DPR RI/I/2018-2019

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 *juncto* Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;

b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6A/DPR RI/II/2014-2015;

c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;

d. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-7 tanggal 31 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDI Perjuangan, FPG, FPD, FPKS, FPAN, FPPP, FPKB, F-PGERINDRA, FPN Demokrat dan F-PHANURA;
8. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
9. Para Deputi dan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA,

H. BAMBANG SOESATYO, S.E.,M.B.A.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/DPR RI/I/2018-2019
TANGGAL : 31 OKTOBER 2018

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR/KOMISI II	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR/KOMISI III	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
4.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR/KOMISI VI	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
5.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR/KOMISI VIII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
6.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
8.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
9.	RUU tentang Pertembakuan	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
10.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
11.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR/KOMISI X	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
12.	RUU tentang Kebidanan	DPR/KOMISI IX	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
13.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
14.	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
15.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR/KOMISI VII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
17.	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR/KOMISI V	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
18.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
19.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
20.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
21.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
22.	RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
23.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
24.	RUU tentang Bea Meterai	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
25.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
26.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
27.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
28.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/KOMISI VI	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
29.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/ANGGOTA	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
30.	RUU tentang Pekerjaan Sosial	DPR/KOMISI VIII	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
31.	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR/ANGGOTA	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
32.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
33.	RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
35.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
36.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
37.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
38.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/KOMISI VII	Menunggu Paripurna Penetapan menjadi RUU Inisiatif DPR	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
39.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/KOMISI I	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
40.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR/ANGGOTA	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
41.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
42.	RUU tentang Penyadapan	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
43.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR/KOMISI IX	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
44.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/KOMISI V	Penyusunan	RUU Usulan Baru
45.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPRKOMISI VII	Penyusunan	RUU Usulan Baru
46.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
47.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
48.	RUU tentang Permusikan	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
49.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
50.	RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
51.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
52.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
53.	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
54.	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
55.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Penyusunan	RUU Usulan Baru

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/DPR RI/I/2018-2019
TANGGAL : 31 OKTOBER 2018

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015-2019

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 19 Tahun 2016
4.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
5.	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/PEMERINTAH	
6.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
8.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
9.	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
10.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH	
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH	
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
13.	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH	
14.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH	
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 8 Tahun 2015

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
19.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 9 Tahun 2015
20.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 7 Tahun 2017
21.	RUU tentang Pertanahan	DPR	
22.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 2 Tahun 2018
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR/DPD	
25.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR/PEMERINTAH	
26.	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD	
27.	RUU tentang Provinsi Bali	DPD	
28.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR	
29.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
30.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	
31.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
32.	RUU tentang Perkumpulan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
33.	RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	
34.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR	
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/PEMERINTAH	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH/DPD	
37.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH	
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
39.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR	
41.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
42.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR/DPD	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 5 Tahun 2018
44.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH	
45.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR	
46.	RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 20 Tahun 2016
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
48.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH	
49.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 13 Tahun 2016
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
52.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	
53.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH	
54.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH	
55.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
57.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	
58.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH	
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR	
60.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	
61.	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	DPR	
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR	
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
64.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR	
66.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD	
67.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
68.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH	
69.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 7 Tahun 2016
70.	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH	
71.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR	
72.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR	
74.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR	
75.	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR	
76.	RUU tentang Jalan	DPR	
77.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR	
78.	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR	
79.	RUU tentang Arsitek	DPR	
80.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
81.	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR	
82.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR	
83.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR	
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR/ DPD	
85.	RUU tentang Perkoperasian	PEMERINTAH	
86.	RUU tentang Pertembakauan	DPR	
87.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR	
88.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	
89.	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH	
90.	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
91.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD	
92.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
93.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	
94.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
95.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	
96.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	
97.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	PEMERINTAH	
98.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR	
99.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
100.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR	
101.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
102.	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
103.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
104.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR	
105.	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 8 Tahun 2016
106.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR/ DPD	
107.	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 1 Tahun 2018
108.	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR	
109.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	DPR	
110.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR	
111.	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR/ PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH	
113.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 18 Tahun 2017
114.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
115.	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR/ DPD	
116.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial	DPR	
117.	RUU tentang Kebidanan	DPR	
118.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 6 Tahun 2018
119.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR	
120.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR	
121.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR	
122.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH	
123.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH	
124.	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR/PEMERINTAH	
125.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/PEMERINTAH	
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
127.	RUU tentang Pemajuan Kebudayaan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 5 Tahun 2017
128.	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
129.	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 3 Tahun 2017
130.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR/DPD	
131.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR	
132.	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
133.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERNTAH	
134.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH	
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 9 Tahun 2018
136.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR/PEMERINTAH	
137.	RUU tentang Pencegahandan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 9 Tahun 2016
138.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD	
139.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR	
140.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
141.	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH/DPD	
142.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH/DPD	
143.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH/DPD	
144.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
145.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
147.	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH	
148.	RUU tentang Penjaminan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 1 Tahun 2016
149.	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH	
150.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH	
151.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
152.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD	
153.	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR/DPD	
154.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
155.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	
156.	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH	
157.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	
158.	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAH	
159.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR	
160.	RUU tentang Tabungan Haji	DPR	
161.	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 11 Tahun 2016
162.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR	
163.	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan	DPR	
164.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
165.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR	
167.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	
168.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
169.	RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	
170.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
171.	RUU Tentang Konsultan Pajak	DPR	
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	
173.	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH	
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH	
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD	
176.	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	
177.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR	
178.	RUU tentang Sanitasi.	DPR	
179.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR	
182.	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR	
183.	RUU tentang Permusikan	DPR	
184.	RUU tentang Hak atas Tanah Adat	DPD	
185.	RUU tentang Penyadapan	DPR	
186.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
187.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	
188.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
189.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	